



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 28 Maret 2016

Halaman: 22

Rumah Aman Korban KDRT Beroperasi Mei

• YULIANINGSIH

KPMP juga membentuk satgas penanganan korban KDRT berbasis kelurahan.

YOGYAKARTA — Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi perhatian serius jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai langkah konkret, bakal dioperasikan sarana rumah aman bagi korban maupun saksi kasus KDRT.

"Rumah aman ini khusus bagi perempuan dan anak saksi dan korban KDRT," ujar Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, Ahad (27/3).

Menurutnya, saat ini sarana rumah aman itu masih dalam tahap re-

novasi, dan rencananya akan diresmikan penggunaannya Mei mendatang. Nantinya, ia menegaskan, rumah ini akan dijaga oleh petugas khusus. "Lokasinya kami rasisikan tapi sudah tersedia. Yang penting, setiap korban KDRT terutama yang mengalami trauma akan kami tampung di rumah aman sekaligus kami bina hingga kasusnya selesai," ujarnya.

Selain menyediakan rumah aman, pihaknya juga membentuk satgas penanganan korban KDRT berbasis kelurahan. Dengan begitu, katanya, maka penanganan korban KDRT bisa lebih cepat. Apalagi, KDRT bukan lagi urusan internal di keluarga, melainkan menjadi urusan publik. "Setiap persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kami dari unsur pemerintah maupun kelompok lain, bisa ikut terlibat."

Oleh karenanya, ia meminta agar korban jangan takut atau malu untuk melaporkan setiap kekerasan yang dialaminya. Lebih lanjut ia mengingatkan, kasus KDRT tidak sebatas berupa kekerasan fisik namun juga psikis, penelantaran, serta eksploitasi.

Meski demikian, pihaknya berharap seluruh elemen masyarakat memiliki pemahaman yang utuh serta berani melapor jika menemukan kasus KDRT. Semakin banyak yang melapor akan semakin bagus karena bisa segera ditangani.

Diakui, keberadaan rumah aman milik Pemkot Yogyakarta tersebut akan mendukung rumah aman yang sudah dimiliki Pemda DIY. Hal ini lantaran fasilitas yang dimiliki oleh DIY tersebut sangat terbatas dan dinilai kurang representatif.

Sedangkan yang dimiliki Pemkot tidak hanya berisi satu ruang, melainkan disekat beberapa ruang. Pada kompleks bangunan juga digunakan untuk aktivitas organisasi sosial mitra pemerintah. Dengan demikian, kata dia, setiap hari akan ada kegiatan sehingga kelak jika ada korban kekerasan tidak merasa jenuh.

Berdasarkan data, kasus KDRT sebenarnya cenderung menurun. Misalnya dalam kurun 2013 hingga 2014, dari 691 kasus menjadi 641 kasus. Namun kekerasan terhadap anak yang termasuk dalam KDRT justru

naik dari 103 kasus menjadi 142 kasus. Begitu juga di 2015, hingga triwulan ketiga ditangani 501 kasus.

Peningkatan jumlah laporan ditengarai lantaran kesadaran masyarakat setempat yang bersinergi dengan satgas di kelurahan. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Pita Yulia Kisworo mengatakan, untuk mendukung kesehatan masyarakat dan keluarga baik fisik maupun psikis pihaknya tengah menyiapkan aturan baru perihal Kelurahan Siaga (Kesi).

Ia menjelaskan, peraturan wali kota (perwal) baru ini akan menjadi wadah aktivitas resmi lembaga tersebut. Ini agar kesinambungannya jelas, anggarannya dan sebagainya juga jelas," katanya.

Dikatakan, sejauh ini sebanyak 45 kelurahan sudah memiliki Kesi. Nantinya semua persoalan kesehatan diampu langsung oleh Kesi yang anggotanya berasal dari elemen masyarakat. Beberapa hal yang langsung ditangani Kesi antara lain posyandu, PHBS dan pusat informasi kesehatan, Pos Lansia, dan sebagainya.

Instansi	Nilai Berita	
1. KPMP	☐ Negatif	☐ An
2. Din. Kesehatan	☒ Positif	☐ S
3.	☐ Netral	☐ B
4.	✓ Biasa	
5.	✓ Untuk diketahui	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005